

PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PENGGUNAAN DANA DESA

Eni Dwi Susliyanti¹, Enita Binawati²

eni.susliyanti@gmail.com¹, enitabinawati@gmail.com²

Jurusan Akuntansi, STIE Solusi Bisnis Indonesia

ABSTRACT

Implementation of regional autonomy in Indonesia urges local governments to carry out public sector accountability as a form of responsibility to the public. Accountability in public sectors consist of various aspects, one of them is financial accountability and performance accountability. Financial accountability and performance accountability of the government can influence the level of public trust and satisfaction over the government's performance in managing the use of Village Fund.

Purpose of this research is to examine the effects of financial accountability and performance accountability toward public trust and satisfaction on the use of Village Fund. Method of this research is mix method (quantitative and qualitative). This research is conducted in Yogyakarta Province with 200 respondents. This research uses quantitative and qualitative method by Partial Least Square (PLS) 2.0. The result shows that financial accountability does not influence public trust and satisfaction on the use of Village Fund, whereas performance accountability influences public trust and satisfaction on the use of Village Fund.

Keywords: *Financial Accountability, Performance Accountability, Public Trust, Public Satisfaction, Village Fund*

ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah di Indonesia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan akuntabilitas sektor publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntabilitas sektor publik terdiri dari berbagai aspek, salah satunya adalah akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan dan Akuntabilitas kinerja suatu Pemerintah dapat berdampak pada tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam mengelola penggunaan Dana Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan Dana Desa. Metode penelitian *mix method* (kuantitatif dan kualitatif). Penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah responden 200. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan alat analisis *Partial Least Square* (PLS) 2.0. Hasil menunjukkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa, akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas Kinerja, Kepuasan Masyarakat, Kepercayaan Masyarakat, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pasca orde baru, Indonesia mengalami banyak perubahan khususnya dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem sentralistik, namun seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah saat ini menganut sistem desentralisasi fiskal, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan Tap MPR Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menjadi landasan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diberi kewenangan dan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam penerapannya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun daerah yang mandiri dengan tujuan agar setiap daerah mampu menghasilkan kualitas kinerja dalam pengelolaan sumber daya daerah secara efisien dan efektif dan mengembangkan potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah tersebut. Effendi (2006) menyatakan hasil dari pengelolaan sumber daya daerah oleh masing-masing pemerintah daerah akan dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Lebih lanjut Mardiasmo (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang penting atas segala aktivitas kegiatan dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang

memberi amanah. Pemerintah merupakan wakil rakyat/masyarakat atau pihak yang diberi amanah oleh masyarakat. Jika pemerintah menjalankan amanah dengan baik, masyarakat akan percaya kepada pemerintah. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam suatu kehidupan bernegara karena pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Halimatussa'diyah, 2012). Apabila kinerja pemerintah baik maka masyarakat akan menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah dan sebaliknya apabila kinerja pemerintah buruk maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Jadi kinerja pemerintah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Fard & Rostamy, 2007).

Di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan (Daniprawiro, 2013). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena adanya kesenjangan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya (Nye, dkk, 1997 dalam Welch, dkk, 2004). Grosso dan Gregg (2011) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Penelitian sebelumnya oleh Rahmawati & Basuki (2013) meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat hasilnya konsisten dengan penelitian Fard & Rostami (2007) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pemda terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Yudhika (2013) meneliti mengenai konflik keharusan akuntabilitas dan kinerja kerja NGO di Indonesia menggunakan variable akuntabilitas yang diajukan oleh Johnson & Romzek (1999), hasilnya bervariasi ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh.

Untuk melihat suatu daerah dinyatakan akuntabel atau tidak bisa dilihat dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan prinsip *value for money* (efisien, efektif, ekonomis) atau belum. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik merupakan wujud akuntabilitas daerah. Pemerintah menganggap adanya akuntabilitas mampu memberikan perubahan kinerja di instansi pemerintahan yang lebih baik atau yang dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adanya LAKIP mendorong lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan *good governance*.

Penerapan *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan. Terwujudnya *good governance* bisa terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang di berikan pemerintah dengan melihat akuntabilitasnya. Pemerintah daerah harus dapat mempertanggung jawabkan (akuntabilitas) atas pelayanan publik dan menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka sebagai perwujudan *good government* khususnya dalam penggunaan dana desa yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas sektor publik terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat dalam penggunaan dana desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja terhadap Kepercayaan

dan Kepuasan atas Penggunaan Dana Desa, di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Suryanto, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan *Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)* dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Akuntabilitas Sektor Publik

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting di Indonesia sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada Januari 2001. Pemerintah ingin mencapai tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu menciptakan *good governance* yang berarti bahwa pemerintah yang baik itu dapat dilihat dari adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, adanya penegakkan hukum. Mardiasmo (2002:21) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang lebih luas daripada *stewardship*, yang mana *stewardship* lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien dan tidak wajib untuk melaporkan sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh *steward* terhadap yang memberikan tanggungjawab. Halim (2007:254) juga mengartikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban yang merupakan

ciri dari “*good governance*” atau pengelolaan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan peraturan terhadap peraturan perundangan (Halim, 2007:254). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN dan BPKP, dalam Mardiasmo, 2007:254).

Menurut Mardiasmo (2007) terdapat beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas keuangan. Ada dua aspek dalam akuntabilitas keuangan, diantaranya adalah (1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat ditelusuri otoritas legalnya, dan (2) pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip akuntabilitas keuangan juga ada dua hal, meliputi (1) adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dicapai. Dalam akuntabilitas keuangan juga terdapat beberapa instrumen utama yang harus diperhatikan yaitu anggaran pemerintah, data yang dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya.

Reformasi keuangan daerah memunculkan adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam akuntabilitas keuangan. Dapat diartikan bahwa adanya reformasi keuangan menuntut akuntabilitas kinerja yang tercermin dari akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan wujud dari semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah atas penggunaan dana keuangan dalam rangka untuk pelayanan publik.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kunci dari terwujudnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas kinerja juga tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi sektor publik (Bastian, 2010:88). Dalam konteks hukum, akuntabilitas organisasi harus dipenuhi oleh suatu organisasi atas kinerja yang diperoleh secara efektif dan efisien. Pandangan lain muncul dari Ledvina, 1991; dalam Santoso dan Pam belum (2008) bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada di luar tanggungjawab dan kewenangan.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menjelaskan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Misi ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik.

Tujuan dan sasaran dari akuntabilitas kinerja adalah mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai pemerintahan yang baik dan terpercaya. Berikut tujuan dan sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja, yaitu (1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi dengan efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, (2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah, (3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan (4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kepuasan Masyarakat dan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat diartikan bahwa masyarakat percaya jika pemerintah mampu, pemerintah baik, dan jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur Negara

(Grimmelikhuijsen, 2012) dan kepercayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat merasa puas dengan pemerintah (Fard & Rostamy, 2007). Dalam penelitian ini variabel kepuasan diartikan sebagai kepuasan individu yang dirasakan oleh masing-masing individu yang merupakan bagian dari masyarakat sehingga jika digabungkan menjadi kepuasan masyarakat. Sedangkan kepercayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasa percaya masyarakat kepada pemerintah atas pelaksanaan tugas pemerintah (Grimmelikhuijsen, 2012). Sehingga hipotesis yang ingin dibangun berdasarkan pendapat di atas adalah:

Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat atas Penggunaan Dana Desa

Good governance bisa tercapai dengan baik diperlukan akuntabilitas sektor publik yang dijalankan dengan optimal. Akuntabilitas sektor publik atau dalam hal ini adalah pemerintah dapat mempertanggungjawabkan segala kinerjanya kepada masyarakat, yang terbagi menjadi akuntabilitas keuangan dan kinerja (Krina, 2003). Sedangkan akuntabilitas didefinisikan menjadi beberapa dimensi oleh Ellwood, 1993; dalam Mardiasmo (2002:21), yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Penelitian Fard dan Rostamy (2007) menunjukkan akuntabilitas pemerintah dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Didasarkan dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh pertanggungjawaban pemerintah dalam hal ini akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa. Jika pemerintah dapat mempertanggungjawabkan atas segala kinerjanya maka kepercayaan dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan semakin tinggi, dan jika tidak maka kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah akan menurun. Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti ingin menangkap sejauh mana

kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pertanggungjawaban pemerintah, dengan hipotesis yang dibangun adalah:

H_{1a}: Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa

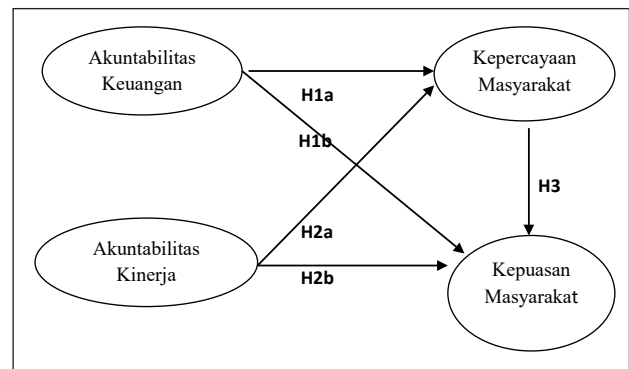
H_{1b}: Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa

H_{2a}: Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa

H_{2b}: Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat atas penggunaan dana desa

H₃: Kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan menguji pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat, atas penggunaan dana desa.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris sekuensial (*sequensial explanatory*). Strategi *eksplanatoris sekuensial* digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil-hasil kuantitatif berdasarkan pengumpulan data kuantitatif dan diikuti dengan metode kualitatif.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode campuran (*mix method*). Metode

campuran menurut Creswell (2010:5) didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif.

1. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu memilih sampel sesuai kriteria yang sudah ditentukan dengan beberapa pertimbangan. Sampel dalam penelitian adalah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kriteria sampel yang digunakan adalah masyarakat yang ada dalam unit organisasi tingkat desa yang terlibat langsung dalam penyusunan dan atau pelaksanaan dan atau pelaporan dana desa (Pamong desa, tokoh masyarakat, unsur kelembagaan desa, Posyandu, PKK, Karangtaruna) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 200 responden.

2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- a. Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja
Variabel akuntabilitas mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati & Basuki (2013) dan penelitian Fard & Rostami (2007). Pengukuran variabel menggunakan 7 (tujuh) poin skala Likert dengan tujuh alternatif jawaban, yaitu skor 1 artinya sangat tidak setuju (STS), skor 2 artinya tidak setuju (TS), skor 3 artinya agak tidak setuju (ATS), skor 4 artinya netral (N), skor 5 artinya agak setuju (AS), skor 6 artinya setuju (S) dan skor 7 artinya sangat setuju (SS).
- b. Kepuasan Masyarakat
Variabel kepuasan masyarakat diadopsi dari Fard dan Rostami (2007), dengan menjelaskan mengenai kepuasan sebagai individu masyarakat yang atas apa yang dirasakan. Variabel sumber daya diukur menggunakan 7 (tujuh) poin skala Likert.
- c. Kepercayaan Masyarakat
Variabel kepercayaan masyarakat menjelaskan mengenai kepercayaan individu masyarakat kepada pemerintah

bahwa pemerintah mampu menjalankan kinerjanya secara jujur dan baik. Instrumen pertanyaan yang digunakan terdiri dari 4 (empat) pertanyaan yang diadopsi dari Fard dan Rostami (2007). Variabel informasi diukur menggunakan 7 (tujuh) poin skala Likert.

3. Teknik Analisis Data

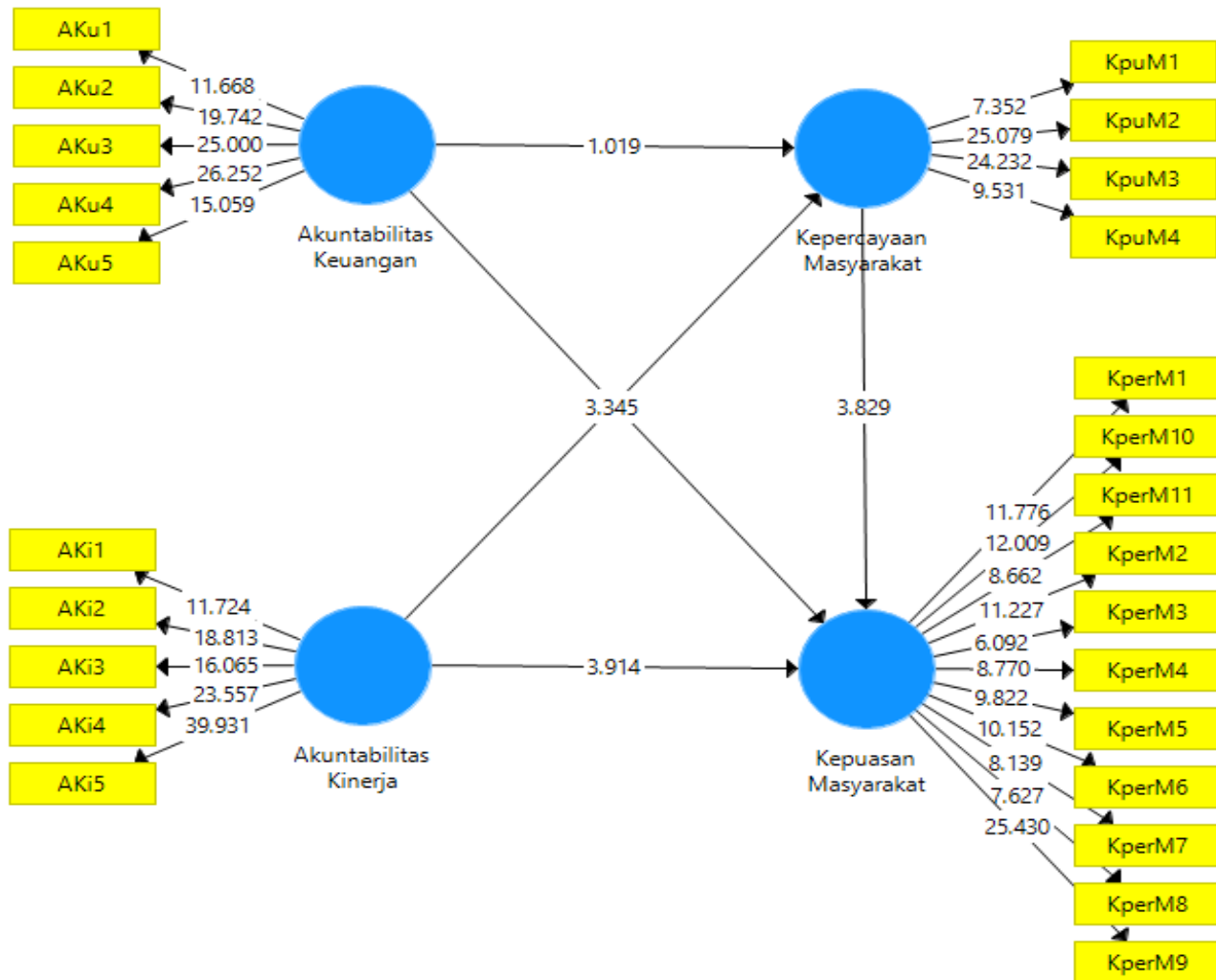
Dalam menguji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan alat analisis *Partial Least Square (PLS)*. Analisis PLS adalah teknik statistika multivariat dengan membandingkan antara variabel dependen berganda dengan variabel independen berganda dalam rangka memprediksi suatu model atas pengembangan teori penelitian (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:11).

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 200 eksemplar dan kuesioner yang kembali sebesar 196 eksemplar atau dengan tingkat pengembalian 98%. Jumlah kuesioner yang kembali tidak seluruhnya dapat peneliti gunakan dalam penelitian. Terdapat 30 eksemplar harus di *drop* karena terdapat kuesioner yang tidak diisi secara lengkap oleh responden. Jadi data terakhir yang dapat peneliti gunakan dalam penelitian tersisa 166 eksemplar. Untuk wilayah pemerintah kota Yogyakarta, tidak berhasil menyebar kuesioner di wilayah tersebut dikarenakan ternyata hasil di lapangan menunjukkan bahwa wilayah kota Yogyakarta tidak memperoleh anggaran dana desa karena kota tersebut sudah dianggap layak oleh Pemerintah Provinsi DIY.

Untuk mengukur keterdukungan hipotesis, maka dilakukan pengujian model struktural menggunakan *bootstrapping* dalam PLS. Berikut ini hasil evaluasi model struktural dapat dilihat pada Gambar 2.

Dari proses *Bootstrapping* yang dilakukan seperti Gambar 2, menghasilkan koefisien jalur yang disajikan dalam Tabel 1.



Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 Tahun 2017

Gambar 2. Diagram *Bootstrapping* – Evaluasi Model Struktural

Tabel 1. Koefisien Jalur (*Mean, STDEV, T-Values*)

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics (O/STERR)	P-Value
AKu → KperM	0.163	0.147	0.160	0.309	1.019
AKu → KpuM	0.052	0.064	0.121	0.667	0.431
AKi → KperM	0.445	0.465	0.133	0.001	3.345
AKi → KpuM	0.481	0.484	0.123	0.000	3.914
KperM → KpuM	0.361	0.354	0.094	0.000	3.829

Sumber: Output Smart PLS ver.2.0 tahun 2017

Penelitian ini mengajukan 5 (lima) hipotesis. Kelima hipotesis tersebut terdiri dari H1a, H1b, H2a, H2b, dan H3. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan PLS, yang dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut analisis terhadap hasil pengujian hipotesis, adalah:

H_{1a}: Akuntabilitas Keuangan (AKu) berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat (KperM).

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel 1, menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas keuangan terhadap kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 1,019 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (y1) 0,163. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1a pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (tidak dapat diterima).

H_{1b}: Akuntabilitas Keuangan (AKu) berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat (KpuM).

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas keuangan terhadap kepuasan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0,431 yang tidak memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (y1) 0,052. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa H1b pada penelitian ini tidak terdukung secara empiris (tidak dapat diterima).

H_{2a}: Akuntabilitas Kinerja (AKi) berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat (KperM).

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel 1, menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,345 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (y1) 0,445. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2a pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

H_{2b}: Akuntabilitas Kinerja (AKi) berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat (KpuM).

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam tabel 1, menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas kinerja dengan kepuasan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,914 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (y1) 0,481. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2b pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

H₃: Kepercayaan masyarakat (KperM) terhadap kepuasan masyarakat (KpuM)

Dari koefisien jalur yang dapat dilihat dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan kepuasan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,829 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$ (T-table), dan nilai koefisien jalur (y2) 0,361. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 pada penelitian ini terdukung secara empirik (dapat diterima).

Berikut kesimpulan hasil pengujian hipotesis, yang dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipo-tesis	Hubungan Antar Variabel	Tanda	Koefisien	T-Value	Hasil
H1a	AKu -> KperM	-	0.163	1.019	Tidak Terdukung
H1b	AKu -> KpuM	-	0.052	0.431	Tidak Terdukung
H2a	AKi -> KperM	+	0.445	3.345	Terdukung
H2b	AKi -> KpuM	+	0.481	3.914	Terdukung
H3	KperM -> KpuM	+	0.361	3.829	Terdukung

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka berikut ini interpretasi hasil penelitian:

- Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat (H1a dan H1b)

Berdasarkan hasil penelitian, variabel akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat, sehingga hipotesis ini yang menyatakan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat ditolak. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya informasi keuangan yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat sehingga ada atau tidak adanya akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Rahmawati & Basuki (2013) yang meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu masyarakat kurang responsif terhadap pertanggungjawaban keuangan Dana Desa, dimana responsif menunjukkan salah satu karakteristik dari *good corporate governance*.

- Pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap kepercayaan masyarakat (H2a)

Berdasarkan hasil penelitian, variabel akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga hipotesis ini yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Basuki, (2013) meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat dan konsisten dengan penelitian Fard & Rostami (2007) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

- c. Pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap kepuasan masyarakat (H2b)
Berdasarkan hasil penelitian, variabel akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga hipotesis ini yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Basuki, (2013) meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat dan konsisten dengan penelitian Fard & Rostami (2007) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pemda terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
- d. Pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepuasan masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian, variabel kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, sehingga hipotesis ini yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,914 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$. Hal ini berarti jika kepercayaan masyarakat meningkat maka kepuasan masyarakat juga semakin meningkat.

Analisis Data Kualitatif

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Masyarakat tidak banyak yang mengetahui mengenai informasi keuangan dana desa. Hal ini tersirat dalam pernyataan seorang narasumber (pamong desa) dari desa Tamantirto (Bantul) yang menyatakan, "Pelaporan sudah terintegrasi dengan siskeudes dimana bendahara desa langsung memasukkan nominal sehingga laporan bisa dibuat. Sayangnya masyarakat umum tidak dapat mengakses siskeudes ini". Selain itu dinyatakan juga bahwa, "setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan akan diinformasikan di papan pengumuman. Pada akhir tahun anggaran, akan dilaksanakan uji publik atas realisasi semua program selama tahun anggaran dengan melibatkan penikmat manfaat. Dalam uji publik semua pihak menerima hasil laporan, tetapi ketika di luar forum banyak yang protes terhadap hasil laporan". Narasumber lain pamong desa Candirejo (Gunung Kidul) menyatakan bahwa "masyarakat terlalu menuntut tinggi dengan adanya Dana Desa sebesar 1 milyar padahal kenyataannya tidak semua desa menerima sebesar 1 milyar di desanya hanya 800 jutaan".
2. Perencanaan Dana Desa sudah dilakukan secara partisipatif yang diwakili oleh pamong desa, unsur kelembagaan desa dan tokoh masyarakat. Fokus pada anggaran program sesuai dengan sumber anggaran. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam *public hearing* ini karena mereka mengawal apakah usulan mereka masuk ke dalam rencana program desa atau tidak. Menurut Kepala Seksi Pembangunan Desa Tirtonirmolo (Bantul) kendala yang dihadapi yaitu "Pemerintah desa harus menalangi dahulu dana kegiatan, karena seringkali dana terlambat dicairkan. Masyarakat kadang-kadang salah persepsi terkait anggaran karena masyarakat menganggap anggaran hanya sebatas material sesuai dengan undang-undang, sementara dana untuk tenaga kerja bersifat swadaya. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan".
3. Program yang sudah dibuat dan dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Perdes mengacu pada parameter yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten. Pelaksanaan melibatkan masyarakat melalui swadaya. Di sini ada TPK (tim pelaksana kegiatan) yang berasal dari masyarakat tanpa ada keterlibatan pamong desa dalam tim ini. Selama pelaksanaan ada monitoring dan evaluasi program baik dari kecamatan maupun masyarakat. Laporan hasil kegiatan diumumkan di papan, pelaporan pada *public hearing* tahun selanjutnya, dan diunggah di *website*. Masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa. Sesuai dengan pernyataan dari masyarakat dari Desa Trimulyo (Bantul) "Pelaporan hasil program juga disampaikan ke warga melalui forum-forum pertemuan

baik pertemuan RT, karang taruna tingkat dusun, maupun pertemuan PKK untuk ibu-ibu”. Lebih lanjut tokoh masyarakat di desa ini (Pak H T) menyatakan, “Saat ini pemerintah sedang mendapat sorotan yang tajam baik dari masyarakat maupun media massa sehingga mau tidak mau harus meningkatkan kinerjanya, khususnya terkait dana desa. Saya percaya Dana Desa yang merupakan amanah dari rakyat digunakan sesuai dengan yang direncanakan”. Hal ini mendukung hipotesis yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan Smart PLS 2.0 memberikan beberapa simpulan yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat (H1a dan H1b ditolak). Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya informasi keuangan yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat (masyarakat tidak bisa mengakses siskeudes) dan kurangnya edukasi pemerintah terhadap masyarakat sehingga ada atau tidak adanya akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu masyarakat kurang responsif terhadap pertanggungjawaban keuangan Dana Desa, dimana responsif menunjukkan salah satu karakteristik dari *good corporate governance*.
2. Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Sehingga hipotesis yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,345 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$.
3. Akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga hipotesis yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,914 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$.
4. Kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga hipotesis yang menyatakan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 3,914 yang memenuhi syarat, yaitu $\geq 1,64$. Hal ini berarti jika kepercayaan masyarakat meningkat maka kepuasan masyarakat juga semakin meningkat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan berikut ini:

1. Hanya menggunakan faktor akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
2. Sampel dalam penelitian ini yaitu hanya satu propinsi sehingga kurang dapat digeneralisir. Objek penelitian di Provinsi DIY, mungkin hasilnya akan berbeda jika diterapkan di provinsi lain yang ada di Indonesia.

Saran Penelitian

Beberapa saran penelitian yang bisa dilakukan untuk peneliti selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas penggunaan Dana Desa seperti transparansi laporan keuangan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas (lebih dari satu provinsi) dan membandingkan antar provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Edisi 3. Yogyakarta. Erlangga.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Versi Terjemahan)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Daniprawiro, M. (2013, Januari Selasa). *Opini*. Retrieved Januari Selasa, 2013, from Madina website: <http://madina.co.id/index.php/opini/4973-hilangnya-kepercayaan-terhadap-para-pemimpin>.
- DiMaggio, P.J. dan W.W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*.
- Effendi, T. 2006. *Modul Indikator Kinerja: Referensi untuk Menentukan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah*. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Fard, H. D., dan Rostamy, A. A (2007). Promoting Public Trust in Public Organization: Explaining the Role of Public Accountability. *Public Organiz Rev*. 7:331-334
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking Transparency, Knowledge, and Citizen Trust in Government: an Experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78:50-73.
- Grosso, A. L., & Gregg, G. V. (2011). How Citizens View Government Performance Reporting. *Public Performance & Management Review*, 35:235-250.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi revisi. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halimatussa'diyah. (2012, Maret Sabtu). *blogspot*. Retrieved Januari Selasa, 2013, from Pengetahuan dan Hati: www.blogspot.com.
- Hartono, Jogiyanto dan Abdillah, Willy. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. BPFE: Yogyakarta.
- Johnston, J. M., & Romzek, B. S. (1999). *Contracting and accountability in state medical reform: Rhetoric, theories, and realities*. *Public Administration Review*, 59(5), 383-399.
- Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Retrieved 2013, from <http://www.goodgovernance.com>
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta hal.1,5.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ketiga, Yogyakarta: Andi Offset. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Rahmawati & Basuki 2013. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, U. dan Pambelum, Y. J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vo.4, No.1, Hal.14-33.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suryanto. 2014. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Welch, E. W., Charles, C. H., & Moon, M. J. (2004). Linking Citizen satisfaction with E-Government and Trust in Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15:371-391.
- Yudhika. E, 2014. Konflik Kebutuhan Akuntabilitas dan Kinerja Kerja NGO di Indonesia. *Jurnal Wahana AA YKPN* Vol 17 No. 2.

